

Etika Dalam Pengajaran Etika di Masyarakat Majemuk

Gunardi Endro

ABSTRAK: Dalam perspektif pendidikan akhlak/moral, pengajaran etika di masyarakat majemuk yang peserta didiknya memeluk agama dan menghayati kebudayaan lokal yang berbeda-beda memiliki suatu tantangan yang tidak ringan. Misi dari pendidikan akhlak/moral secara singkat dapat dirumuskan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan peserta didik untuk berbuat baik. Masalahnya, etika sebagai refleksi kritis-filosofis seringkali dianggap menawarkan alternatif standar moral ideologis yang bersaing dengan standar moral yang sudah terlebih dahulu diyakini peserta didik melalui penghayatan agama dan kebudayaan lokalnya. Disini diajukan argumen bahwa, meskipun pengajaran etika diperlukan untuk membuat pendidikan akhlak/moral efektif mencapai tujuannya, peran etika sebaiknya tidak mengambil alih peran agama dan kebudayaan lokal dalam pendidikan akhlak/moral. Peran etika dan peran agama dan kebudayaan lokal seharusnya saling melengkapi. Peran etika lebih pada pengembangan kemampuan peserta didik untuk berbuat baik, sementara peran agama dan kebudayaan lokal lebih pada penguatan kemauan peserta didik untuk berbuat baik. Dengan adanya keterbatasan peran etika itu, pengajaran etika di masyarakat majemuk memerlukan etika tersendiri untuk menjaga sinergi antar peran sehingga pendidikan akhlak/moral efektif mencapai tujuannya. Enam prinsip etika diajukan disini sebagai pegangan dalam mengajarkan etika, yaitu otonomi, tanggung jawab, transparansi, keadilan, kepedulian, dan profesionalisme.

KATA KUNCI: pendidikan moral, pengajaran etika, agama, kebudayaan lokal, etika pengajaran

ABSTRACT: *In the perspective of moral education, teaching of ethics in a pluralistic society whose learners embrace various different religions and live up to various different local cultures has a serious challenge. The mission of moral education can briefly be defined as an effort to develop the will and the ability of learners to do good. The problem is that ethics as a critical-philosophical reflection is often perceived to offer an alternative ideological moral standard in competition with moral standards which have been firstly*

believed by the learners through appreciation of their religions and local cultures. This paper provides an argument that, though teaching of ethics is indeed required to make moral education effectively achieve its objective, the role of ethics ought not to take over the role of religions and local cultures within the framework of moral education. Ethics, religion, and local culture should complement each other. The role of ethics should be more on developing the learners' ability to do good, while the role of religions and local cultures should be more on strengthening the will of the learners to do good. Given the limited role of ethics, teaching of ethics in a pluralistic society requires ethics of its own to maintain a synergy between the two roles so that moral education effectively achieves its objective. Six ethical principles are here proposed as a guide in teaching ethics, namely: autonomy, responsibility, transparency, justice, caring, and professionalism.

KEY WORDS: *moral education, teaching of ethics, religion, local culture, ethics of teaching*

1. PENDAHULUAN

Arus pesat globalisasi yang melanda seluruh masyarakat di dunia beberapa dekade belakangan ini serentak diikuti reaksi masyarakat untuk mempertahankan identitas kebudayaan lokal. Fenomena ini oleh sosiolog Roland Robertson (1995, 1997) dipopulerkan sebagai suatu gerakan yang disebutnya glocalisasi (*glocalization*). Dalam gerakan ini, globalisasi dan lokalisasi, universalisasi dan partikularisasi, secara simultan terjadi bersamaan. Apa yang secara universal mengalir berbaur dengan unsur-unsur partikular kebudayaan lokal.¹ Meskipun bauran itu terkesan memunculkan polaritas global – lokal dan universal – partikular, tetapi polarisasi tersebut sebenarnya merupakan kesan yang semu belaka. Adanya globalisasi memang menguatkan identitas lokal dan adanya universalisasi menajamkan partikularitas nilai-nilai kebudayaan lokal, tetapi apa yang lokal ternyata ingin meng-global dan apa yang partikular ternyata ingin meng-universal. Gerakan glocalisasi mendorong munculnya dan menguatnya masyarakat

GUNARDI ENDRO – ETIKA DALAM PENGAJARAN ETIKA
DI MASYARAKAT MAJEMUK

majemuk yang anggota-anggotanya menghayati agama dan kebudayaan yang berbeda-beda.

Di dalam masyarakat majemuk, interaksi antar anggota dan antar kelompok anggota masyarakat menjadi semakin sering terjadi namun tidak semuanya berjalan tanpa masalah. Dari interaksi itu, sebagian kelompok anggota masyarakat resah karena merasakan adanya ancaman degradasi kualitas moral dari sudut pandang ukuran moralnya. Keresahan itu dikhawatirkan bisa mengancam stabilitas masyarakat majemuk itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan akhlak/moral diharapkan mampu menangkal degradasi kualitas moral dan menjaga stabilitas masyarakat majemuk. Namun pendidikan akhlak/moral seperti apa yang diperlukan masyarakat majemuk? Pendidikan akhlak/moral berbasis agama atau kebudayaan lokal tertentu mungkin mampu menanamkan semangat untuk menangkal degradasi kualitas moral dari sudut pandang ukuran moralnya sendiri, namun belum tentu mampu menjaga stabilitas masyarakat majemuk dalam multi-interaksinya dengan agama-agama dan kebudayaan-kebudayaan lainnya. Etika sebagai refleksi kritis-filosofis tampaknya bisa membantu pengembangan kemampuan anggota masyarakat untuk menjaga stabilitas masyarakat majemuk. Tetapi etika memiliki keterbatasannya sendiri dan, oleh karena itu, perlu etika juga dalam proses pengajarannya. Bagaimana cara etis mengajarkan etika di masyarakat majemuk? Permasalahan ini penting untuk diselidiki, namun sebelum itu makna, maksud dan tujuan dari pendidikan akhlak/moral perlu diungkapkan terlebih dahulu.

2. PENDIDIKAN AKHLAK/ MORAL

Kata “akhlaq” (akhlak) merupakan bentuk jamak dari kata “khuluq” yang dalam bahasa Arab berarti tabiat, perangai, kebiasaan, atau karakter.² Akhlak merujuk pada keadaan tetap jiwa (batin) manusia yang terbentuk melalui proses pembiasaan dan yang mendorongnya pada pola perilaku tertentu. Orang yang berakhlak mulia adalah orang yang memiliki karakter baik, orang yang berkeutamaan (*virtuous man*), atau orang yang memiliki kecenderungan tetap untuk berbuat baik. Sedangkan kata “moral” merujuk pada persoalan hidup, sikap dan tindakan manusia dalam interaksinya dengan sesama. Berkaitan dengan persoalan moral ini, manusia dalam kehidupan sosialnya memiliki kemampuan untuk mengenali dan menentukan standar baik-buruk yang dengan itu hidup, sikap dan tindakan yang dilakukannya dapat dinilai. Standar baik manusia sebagai manusia, yang terwujud dalam sikap dan tindakannya, dinamakan standar moral. Standar moral bisa berupa nilai, norma, prinsip, ajaran, kebajikan dasar, aturan, dan kesepakatan/kontrak antar manusia, yang tersusun dengan struktur tertentu. Dengan demikian, manusia yang berakhlak mulia adalah manusia yang bermoral; hidup, sikap dan tindakannya sesuai dengan standar moral.

Baik kata akhlak maupun kata moral digunakan bersama disini, bukan hanya karena adanya kesesuaian makna namun juga karena adanya perbedaan di antara keduanya. Akhlak mencakup wilayah yang lebih luas daripada wilayah moral. Akhlak mencakup tidak hanya standar baik manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia, melainkan juga mencakup standar baik manusia dalam hubungannya dengan Tuhan (Pencipta) dan

alam semesta ciptaanNya.³ Dalam akhlak, standar moral dipercaya bukan berasal dari penemuan manusia ketika berinteraksi dengan sesamanya, melainkan berasal dari Tuhan. Meskipun demikian, apa yang dipercaya sebagai standar moral, baik itu berasal dari penemuan manusia sendiri dengan sesamanya maupun berasal dari wahyu Tuhan, tetap saja merupakan pemahaman manusia melalui penggunaan akal budinya. Ketika standar moral dipergunakan sebagai acuan untuk penilaian baik-buruk manusia, penilaian terhadap sikap dan tindakan manusia yang berdampak pada sesamanya, penilaian itu harus dipertanggungjawabkan.

Pendidikan akhlak/moral merupakan suatu upaya sistematis dimana peserta didik menanamkan kepercayaan terhadap standar moral dan mengekspresikannya menjadi sikap dan tindakan yang baik, tepat sesuai dengan konteks yang dihadapi. Pendidikan akhlak/moral yang ideal mengembangkan secara simultan tiga fakultas dalam diri peserta didik, yaitu akal (*reason*), kehendak (*will*), dan perasaan (*feel*). Apa yang diharapkan dari pendidikan akhlak/moral adalah bahwa peserta didik tidak hanya mengetahui sikap dan tindakan apa yang harus dilakukan pada konteks tertentu (*what*), kenapa ia harus bersikap dan bertindak demikian (*why*), tetapi juga mengetahui bagaimana ia melaksanakan dan merasakannya (*how*). Proses pendidikan bukan sekedar proses mekanistik, melainkan proses internalisasi standar moral ke dalam diri peserta didik. Pada pendidikan akhlak/moral yang ideal, kemampuan kognitif, afektif, dan konatif peserta didik berkembang secara simultan dan seimbang.

Dalam keseimbangan itu, peran perasaan menggiring hasrat fisik manusia untuk melakukan tindakan tertentu, seperti misalnya rasa

kasihan seseorang kepada pengemis yang ada di hadapannya mendorong hasratnya untuk memberikan uang di dompetnya. Hanya karena fungsi akal, hasratnya tersebut terhenti, tertunda dan belum menjadi efektif.⁴ Akal mencari alasan mengapa ia harus memberikan uangnya seketika itu. Kepercayaan bahwa berderma kepada fakir-miskin merupakan tindakan terpuji (baik) dan bahwa pengemis itu betul-betul memerlukan uangnya, bukan pencari nafkah yang dikoordinasi mafia pengemis, memberinya alasan untuk mengambil keputusan memberikan uangnya. Akal menyaring berbagai macam kepercayaan yang dimilikinya. Semakin kuat kepercayaannya, semakin kuat pula kehendak untuk mengefektifkan hasrat melalui keputusan yang diambilnya. Peran penyaringan kepercayaan yang dilaksanakan akal akan memastikan bahwa tindakan yang dikehendaknya sungguh-sungguh baik, terpuji, dan tepat sesuai dengan konteks yang dihadapi.

Dalam tradisi pemikiran Aristoteles, peran akal adalah pengendali perasaan, keputusan dan tindakan sehingga selalu jadi yang terbaik, tepat sesuai konteks, tidak kurang dan tidak berlebihan (*the middle way*). Rasa kasihan seseorang yang berlebihan, misalnya, akan mendorong hasratnya untuk memberikan uang kepada pengemis begitu saja tanpa kesadaran penuh apakah tindakannya itu tepat atau tidak. Sebaliknya, tiadanya rasa kasihan akan memutus mata rantai munculnya tindakan berderma. Kepercayaan yang terlalu kuat akan menggeser semua kepercayaan lain sehingga konteks dan ketepatan tindakan terhadap konteks terabaikan.⁵ Sebaliknya, tiadanya kepercayaan akan melenyapkan kehendak awal untuk bertindak. Kepercayaan moral (kepercayaan terhadap standar moral) memang membuat seseorang memiliki kemauan/kehendak untuk berbuat baik, namun hanya akal yang

berperan membuat seseorang mampu menemukan dan menunjukkan tindakan terbaik.

Metode pendidikan akhlak/moral yang tepat bisa berbeda-beda tergantung tahap-tahap perkembangan jiwa peserta didik. Namun maksud utama pendidikan akhlak/moral sama, yaitu menanamkan kepercayaan peserta didik terhadap standar moral untuk kemudian mengekspresikannya menjadi sikap dan tindakan yang baik, terbaik, tepat sesuai dengan konteks yang dihadapi. Tujuannya untuk mengantarkan peserta didik hingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk berbuat baik. Kepercayaannya terhadap standar moral akan mengantarkannya pada kemauan untuk berbuat baik, sedangkan pelatihannya dalam mengekspresikan standar moral menjadi sikap dan tindakan yang tepat akan mengantarkannya pada kemampuan untuk berbuat baik. Lalu di mana peran pembelajaran etika dalam pendidikan akhlak/moral?

3. PERAN ETIKA DALAM PENDIDIKAN AKHLAK/ MORAL

Ketika akal menghentikan atau menunda efektifnya suatu hasrat, kesadaran orang pun muncul, dan kemudian akal menyusun alasan apa yang seharusnya (*should*) atau sebaiknya (*ought to*) ia lakukan. Dalam kaitannya dengan persoalan baik-buruk manusia sebagai manusia, alasan yang disusunnya merujuk pada standar moral dan realitas konteks yang dipercayainya. Alasan merupakan pertanggungjawaban bahwa apa yang seharusnya/sebaiknya dilakukan sungguh-sungguh mencerminkan kemanusiaannya. Rasionalitas alasan yang disusunnya akan memperkuat kepercayaannya terhadap apa yang seharusnya/sebaiknya ia lakukan sehingga kehendak/kemauannya

untuk melakukannya pun meningkat. Refleksi kritis akal untuk apa yang seharusnya/sebaiknya dilakukan seorang manusia sebagai manusia itulah yang kita kenal sebagai etika, suatu cabang filsafat. Dengan demikian, ciri-ciri etika dan peran etika dalam pendidikan akhlak/moral dapat diuraikan lebih lanjut dengan tiga catatan sebagai berikut:

Sebagai refleksi kritis, etika tidak memiliki acuan akhir selain rasionalitas. Karena acuan akhirnya rasionalitas maka etika tidak terpenjara di dalam kepercayaan terhadap standar moral apapun. Yang dituntut etika adalah kejelasan. Kalau memang standar moral yang dipahami dan dipercayai seseorang sungguh-sungguh ada (jelas), maka ia harus menunjukkan bahwa standar itu dalam perwujudannya sebagai tindakan baik manusia (sebagai manusia) dapat ditangkap (diterima) akal sehat orang lain. Ada tuntutan objektivitas di sini. Jadi melalui peran etika, pendidikan akhlak/moral harus menjunjung tinggi objektivitas.

Pemahaman seseorang terhadap standar moral maupun realitas konteksnya bersifat tentatif, tidak absolut. Meskipun kepercayaannya terhadap adanya standar moral tertentu barangkali diakuinya absolut (seperti misalnya wahyu Tuhan), kepercayaan itu perlu diuji objektivitasnya ketika dihadapkan pada realitas konteks yang kemudian mewujudkan tindakan yang diakuinya sebagai tindakan baik manusia (sebagai manusia). Kegagalan dalam ujian objektivitas tidak perlu berarti gugurnya kepercayaan absolut, melainkan pemahamannya terhadap standar moral yang mewujudkan tindakan yang diakuinya baik bagi manusia harus dikoreksi. Pemahaman terhadap standar moral dan realitas konteksnya tidak sederhana, karena ada hubungan korelasi timbal-balik (*interplay*) di antara keduanya. Misalnya,

fakta bahwa seorang pengemis ada di depan kita (konteks) bisa saja dipahami sebagai adanya korelasi dengan nilai kasih sayang (standar moral). Tetapi kalau kita kritis dan melakukan penyelidikan yang lebih teliti, bisa jadi justru dipahami sebagai fakta yang berkorelasi dengan nilai keadilan (standar moral) karena ternyata penghasilan kita jauh lebih tinggi daripada penghasilan pengemis itu. Melalui refleksi kritis, etika mempertajam pemahaman orang terhadap standar moral sehingga mewujudkan tindakan kreatif terbaik, tepat sesuai dengan realitas konteksnya. Melalui peran etika, peserta didik dalam pendidikan akhlak/moral menjadi lebih mampu memilih tindakan yang sungguh-sungguh baik dan terbaik.

Tujuan akhir refleksi kritis adalah menemukan apa itu hidup, sikap, dan tindakan baik manusia sebagai manusia. Masalahnya, sebagai makhluk sosial, orang tidak bisa tidak perlu dan harus mempertimbangkan pandangan dan kepentingan orang lain untuk mengenal apa yang baik bagi dirinya sebagai manusia. Perlu, karena manusia tidak mungkin mengenal makna dirinya sendiri sebagai manusia tanpa kehadiran manusia lain. Harus, karena kebebasannya tidak tak-terbatas, manusia mau tidak mau harus hidup bersama manusia-manusia lain dalam ruang dan waktu yang sama sementara sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya terbatas.⁶ Perbuatan seorang manusia pasti sedikit-banyak akan memberi dampak kepada sesamanya. Oleh karena itu kalau refleksi kritis tidak dilakukan bersama-sama dengan manusia-manusia lain, refleksi kritis seorang manusia harus dipertanggungjawabkan kepada manusia-manusia lain. Melalui peran etika, pendidikan akhlak/moral menuntut keterbukaan dan sikap tanggung jawab dari peserta didik: bertanggungjawab terhadap tindakan

yang akan dilakukannya dan mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukannya.

Jadi peran etika dalam pendidikan akhlak/moral adalah memberi kemampuan peserta didik untuk bersikap terbuka, objektif, dan bertanggungjawab terhadap pilihan moralnya. Peran seperti itu hanya bisa efektif jika fungsi akal secara murni dilepaskan dari kepercayaan terhadap standar moral, karena fungsi refleksi kritis adalah yang menguji kepercayaan itu. Jika fungsi akal disubordinasikan pada kepercayaan terhadap standar moral, maka, kalau tidak diistirahatkan, akal hanya akan dipergunakan secara instrumental untuk menyediakan rasionalisasi terhadap pemahaman dan kepercayaan moral yang dianggapnya benar secara simplistis begitu saja. Fungsi akal yang disubordinasikan itu akan dibatasi wilayahnya sehingga tidak mampu secara maksimal mengeksplorasi dan menganalisis konteks keputusan dan tindakan yang mungkin diambil. Padahal, konteks keputusan dan tindakan di era modern sudah sedemikian kompleks dengan berlakunya berbagai tata kelola institusi yang sistemik, sistem kerja profesi, tata proses birokratis, konstelasi politik yang beragam, dan lain-lain yang membutuhkan daya abstraksi akal yang tinggi untuk menganalisis dan mengevaluasinya agar keputusan dan tindakan yang diambil tidak meleset dari konteks. Memaksakan fungsi akal sebagai subordinat kepercayaan moral cenderung akan membekukan kepercayaan moral sehingga orang gagap menanggapi konteks masyarakat modern.

Di lingkungan masyarakat majemuk, masing-masing kelompok masyarakat berpegang pada kepercayaan terhadap standar moral yang berbeda-beda. Bahkan standar moral yang dipercayai masing-masing anggota

kelompok pun berbeda-beda. Struktur nilai yang saya pegang sebagai acuan, misalnya, sangat mungkin berbeda dengan struktur nilai yang dipegang orang lain karena saya dibesarkan oleh orang tua yang berbeda, bergabung dengan institusi sosial dan mengalami interaksi dengan orang-orang lain yang berbeda, dan seterusnya. Subordinasi fungsi akal pada kepercayaan terhadap standar moral hanya akan menjerumuskan masyarakat ke arah relativisme etis, memutlakkan perbedaan, dan menutup dialog antar kelompok dan bahkan antar anggota kelompok sendiri. Padahal kesulitan yang amat serius selalu dihadapi etika ketika relativisme diterima secara luas. Hal ini bukan berarti universalisme etis dipastikan kebenarannya. Hanya saja semangat keterbukaan, objektivitas dan tanggung jawab perlu dan harus terus-menerus digalakkan karena pasti ada irisan kesamaan domain dari berbagai pandangan moral,⁷ atau pasti ada standar baik objektif, dengan mana dialog awal dan kemudian refleksi kritis bersama dapat dilakukan guna mengembangkan irisan kesamaan domain pandangan moral. Pengembangan irisan kesamaan memang tidak mungkin sepenuhnya bisa mencakup keseluruhan domain pandangan moral, tetapi negosiasi selalu bisa dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang prioritas moral, seperti misalnya toleransi, kerjasama, dan kasih sayang antar sesama manusia, sedemikian sehingga harmoni atau stabilitas masyarakat tetap terjaga.

Dalam masyarakat majemuk, etika bisa menjembatani dan sekaligus mempersatukan beragam kepercayaan terhadap standar moral yang berbeda-beda. Masing-masing kepercayaan moral bukannya melemah tetapi justru semakin kuat dalam diaspora ragam kepercayaan moral. Orang boleh saja melakukan tindakan berdasarkan kepercayaan moralnya sendiri yang

berbeda dengan kepercayaan moral orang lain, membawanya pada tindakan yang sama ataupun berbeda, sejauh justifikasi tindakan secara objektif bisa diterima.⁸ Disini, etika tidak akan mengancam kepercayaan orang terhadap standar moral karena etika dipahami punya keterbatasannya sendiri.

4. BATAS PERAN ETIKA DALAM PENDIDIKAN AKHLAK/MORAL

Keterbatasan etika muncul dari ciri hakikinya sendiri yang tidak memiliki acuan akhir selain rasionalitas. Refleksi kritis dalam etika memang membantu orang menemukan alasan atau argumen untuk suatu tindakan yang baik, terbaik, tepat sesuai dengan konteks yang dihadapinya. Argumentasi etika bisa memperkuat kepercayaan orang terhadap standar moral yang darinya kemauan/kehendak untuk melaksanakan tindakan baik itu berawal. Tetapi akal melalui argumentasi etika tidak akan pernah menciptakan kemauan untuk melaksanakan tindakan baik. Kemauan/kehendak seseorang hanya muncul dari kepercayaannya.

Terkait dengan hal ini, Stephen E. Toulmin (1970), melanjutkan pemikiran filsuf Blaise Pascal, menegaskan perbedaan antara etika (*ethics*) dan agama (*religion*), atau antara akal (*reason*) dan keyakinan (*faith*). Menurut Toulmin, etika menunjukkan alasan kepada kita dalam memilih tindakan yang tepat, sedangkan agama membuat hati kita tertarik pada tindakan itu untuk kemudian melaksanakannya. Fungsi akal dalam etika dan fungsi keyakinan dalam agama memiliki wilayah operasional yang berbeda. Berfungsinya akal membuat kita bertanya dan melakukan penyelidikan terus-menerus tentang landasan darimana suatu pilihan tindakan kita ambil. Jika tidak dihentikan sampai pada landasan yang menurut keyakinan kita

bisa diterima, penyelidikan dan pertanyaan akan diajukan terus-menerus *ad infinitum*.⁹ Wilayah operasional akal (*reason*) adalah proposisi jenis tertentu (*proposition*), sedangkan wilayah keyakinan (*faith*) adalah pengertian jenis tertentu (*notions*).¹⁰ Kepercayaan kitalah yang membuat hasil operasional akal maupun keyakinan bisa kita terima. Kita bisa menerima suatu proposisi kalau kita percaya terbuktinya proposisi itu (*belief of a proposition*); dan kita bisa menerima suatu keyakinan kalau kita memahami pengertian yang disampaikan keyakinan itu dan mempercayainya (*belief in a notion*).¹¹

Masalahnya, jika fungsi keyakinan disubordinasikan pada fungsi akal, atau lebih spesifik lagi kepercayaan moral disubordinasikan pada refleksi kritis akal, maka penyelidikan kritis akan berlangsung terus-menerus *ad infinitum* untuk membuktikan bahwa suatu tindakan sungguh-sungguh merupakan tindakan terbaik. Akibatnya, orang tidak akan pernah sempat memiliki kemauan/kehendak untuk bertindak. Yang muncul kemudian adalah perasaan skeptis (skeptisisme) absolut dan walaupun suatu tindakan muncul, tindakan itu sifatnya arbitrer. Refleksi kritis akal tidak bisa melampaui batasnya dan masuk ke dalam wilayah kepercayaan terhadap standar moral. Di sinilah terletak batas peran etika dalam pendidikan akhlak/moral. Etika memang menyediakan teori etika normatif *utilitarianism*, *deontological ethics*, *virtue ethics*, dan lain sebagainya yang bisa dipergunakan untuk menemukan pilihan tindakan terbaik, tetapi penggunaan itu sudah dengan sendirinya mengasumsikan kepercayaan terhadap standar moral yang secara eksplisit atau implisit terkandung di dalam teori etika normatif yang dipergunakan.

Dalam rangka pendidikan akhlak/moral di lingkungan masyarakat majemuk, mengajarkan etika dengan memasok standar moral yang terkan-

andung dalam teori etika normatif bisa jadi akan menimbulkan resistensi peserta didik karena standar moral itu dianggap ideologis dan harus berkontestasi dengan standar moral yang sudah terlebih dahulu dipercaya peserta didik. Metode yang lebih efektif adalah mendorong peserta didik melakukan refleksi kritis dalam proses *interplay* antara standar moral yang dipercayainya dan konteks yang dihadapinya hingga sampai pada alternatif keputusan dan tindakan terbaik yang akan dipilihnya dan kemudian mempertanggungjawabkan pilihan itu kepada peserta didik lainnya. Evaluasi yang dilakukan bersama oleh semua peserta didik terhadap pilihan-pilihan moral diprediksi tidak akan berlarut-larut (*ad infinitum*), karena irisan kesamaan domain dari berbagai pandangan moral yang ada, atau adanya kepercayaan terhadap pengertian-pengertian (*notions*) yang sama, bisa menjadi modal awal atau landasan untuk menyepakati diterimanya alternatif pilihan moral terbaik. Teori-teori etika normatif bisa dipergunakan dalam mengevaluasi pilihan moral, di mana masing-masing teori memberikan satu sudut pandang moral atau satu aspek baik dari pilihan moral itu. Idealnya, semua aspek baik dari suatu pilihan moral saling mendukung satu dengan lainnya. Namun kesempurnaan pilihan moral hampir pasti tidak mungkin ada, terutama jika waktu menjadi batasan dalam pengambilan keputusan. Jika ada aspek yang tidak bisa didamaikan dengan aspek-aspek lainnya, maka kesepakatan tentang prioritas moral perlu didiskusikan berdasarkan kepercayaan terhadap pengertian-pengertian (*notions*) yang sama. Pada tahap-tahap pembelajaran etika tersebut, peran pengajar sangat penting. Ia harus berpegang pada prinsip-prinsip etika tersendiri agar proses pembelajaran etika berjalan efektif.

5. ETIKA DALAM PENGAJARAN ETIKA

Pengajaran etika di masyarakat majemuk tidak bisa tidak harus mempertimbangkan etika juga. Dalam rangka pendidikan akhlak/moral, pengajar etika (pendidik) tidak boleh memaksa peserta didik untuk sampai pada suatu pemahaman dan sebaliknya peserta didik tidak boleh memaksa pengajar untuk menerima pemahamannya. Pemahaman dan kesepahaman hanya muncul dari dalam diri masing-masing. Di sini, sikap saling respek (*mutual respect*) antara pengajar etika dan peserta didik, dan di antara peserta-peserta didik sendiri, perlu terus-menerus dijaga agar pembelajaran etika berlangsung efektif. Salah satu metode pembelajaran etika yang bisa mendukung peran etika dalam pendidikan akhlak/moral sebagaimana diilustrasikan di atas adalah metode dialektis-kritis Sokrates dengan basis studi kasus. Melalui dialog kritis, peserta didik diajak untuk bersama-sama menganalisis baik terhadap konteks kasusnya maupun terhadap standar moral yang terkait, dan kemudian mengevaluasi setiap usulan rumusan pilihan moral yang diajukan. Dengan membandingkan berbagai macam usulan, menyisihkan usulan yang tidak relevan, menyelidiki adanya inkonsistensi internal dalam usulan, dan menjernihkan atau menolak usulan yang inkonsisten,¹² peserta didik diharapkan dapat menemukan pilihan moral terbaik, tepat sesuai dengan konteks kasus yang dipelajari. Penggunaan metode ini tidak hanya menunjukkan proses refleksi kritis yang hasilnya berupa pilihan moral terbaik yang tentatif bisa diterima bersama, tetapi juga dapat menjernihkan pemahaman dan kepercayaan terhadap standar moral yang dipegang peserta didik sendiri.

Agar proses pembelajaran etika tersebut berlangsung efektif, pengajar etika dan peserta didik harus berpegang pada prinsip-prinsip etika yang relevan dengan upaya pemeliharaan masyarakat majemuk yang teratur (*well-ordered society*). Setidaknya enam (6) prinsip etika yang diajukan berikut ini perlu dipakai sebagai rujukan.¹³

(1) Prinsip otonomi

Pendidikan akhlak/moral tidak dimaksudkan untuk menjadikan peserta didik sebagai “mesin” yang berperilaku sedemikian sebagaimana perilaku yang diharapkan masyarakat, melainkan dimaksudkan untuk membina peserta didik agar memiliki kemandirian dalam berpendapat, bersikap, dan bertindak baik. Otonomi peserta didik sebagai manusia harus dijaga dan dikembangkan. Oleh karena itu, kelas sebagai miniatur masyarakat majemuk harus menjamin kebebasan peserta didik. Pengajar etika harus mendorong setiap peserta didik untuk bersikap orisinal, mengembangkan kemandirian, berani bertanya, mengkritik dan mengemukakan pendapatnya sendiri, serta mengusulkan pilihan moralnya sebagai tanggapan terhadap kasus/konteks yang dibicarakan. Agar berjalan efektif, peserta didik sebaiknya ditugaskan untuk melakukan refleksi kritis sendiri terlebih dahulu sebelum dialog kritis antar peserta didik di kelas. Tanpa prinsip ini, maksud dari diselenggarakannya pendidikan tidak akan terwujud.

(2) Prinsip tanggung jawab

Demi pemeliharaan masyarakat majemuk yang teratur (*well-ordered society*), kebebasan tidak bisa tidak harus disertai tanggung jawab. Masyarakat majemuk yang teratur hanya akan terwujud jika ada sikap saling respek (*mutual respect*) antar warganya sebagai manusia, sedangkan sikap saling respek mensyaratkan adanya terlebih dahulu sikap respek masing-masing terhadap diri sendiri sebagai subjek yang bebas. Warga yang mengabaikan tanggung jawab berarti memposisikan diri sebagai objek yang pasif, tidak respek terhadap dirinya sendiri sebagai subjek, sehingga dengan sendirinya menggugurkan sikap saling respek antar manusia dan pemeliharaan masyarakat majemuk yang teratur.¹⁴ Oleh karena itu, prinsip tanggung jawab merupakan inti dari maksud pengajaran etika di masyarakat majemuk. Dengan berkembangnya otonomi peserta didik, kebebasan yang diperoleh peserta didik untuk bertanya, mengkritik, mengemukakan pendapat dan mengusulkan pilihan moral harus disertai dengan sikap untuk bertanggungjawab. Pengajar etika harus menekankan kepada peserta didik pentingnya sikap untuk bertanggungjawab, karena kelalaiannya akan menimbulkan disintegrasi dan merusak proses pembelajaran.

(3) Prinsip transparansi

Pembelajaran etika mengasumsikan bahwa pembelajar (peserta didik) memiliki kemauan untuk mencari tahu tentang perbuatan baik, tentang keputusan dan tindakan yang baik. Di sini diperlukan hati nurani. Tidak ada gunanya mengajarkan etika kepada orang yang

memang dengan sengaja membiarkan kecenderungan untuk berbuat tidak baik, orang yang seringkali disebut “tidak memiliki hati nurani”. Titik awal pembelajaran etika adalah kemauan untuk berbuat baik, kemauan untuk mencari kebenaran bahwa keputusan dan tindakan yang dipilihnya baik.¹⁵ Bukti yang secara konsisten ditunjukkan oleh seseorang yang memiliki kemauan baik adalah bahwa dia berpikiran terbuka (*open minded*) atau transparan. Dengan demikian, pembelajaran etika yang efektif mensyaratkan tegaknya prinsip transparansi. Pengajar etika harus mendorong setiap peserta didik untuk bersikap terbuka dan berbicara jujur demi menjaga transparansi dalam dialog kritis antar peserta didik. Tanpa transparansi, proses dan hasil dialog kritis kehilangan makna.¹⁶

(4) Prinsip keadilan

Diskusi kelas adalah wilayah bersama. Setiap peserta didik memiliki hak sama untuk memanfaatkan wilayah bersama tersebut dalam proses pembelajaran. Seorang peserta didik yang berusaha mengakuisisi/ mendominasi wilayah bersama untuk mendesak argumen dan pemahamannya tidak boleh dibiarkan, karena pemahaman dan kesepahaman tidak bisa dipaksakan. Prinsip keadilan harus ditegakkan. Pengajar etika harus bersikap adil dengan memberikan kesempatan yang sama (*equal opportunity*) kepada semua peserta didik untuk berpartisipasi dalam dialog kritis. Dominasi satu atau sekelompok peserta didik tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Sebaliknya, kepasifan satu atau sekelompok peserta didik yang hanya diam sambil

mengambil manfaat dari proses diskusi kelas (*free riding*) tidak boleh juga dibiarkan. Seperti seorang konduktor orkestra, pengajar etika harus mendorong setiap peserta didik untuk mengambil kesempatan berpartisipasi dalam dialog kritis. Kuantitas dan kualitas partisipasi selayaknya menjadi bagian dari penilaian hasil pembelajaran peserta didik.

(5) Prinsip kepedulian (*caring*)

Pembelajaran etika di lingkungan masyarakat majemuk adalah pembelajaran bersama, bukan pembelajaran yang sifatnya individual. Dalam pembelajaran bersama, dialog kritis antar peserta didik atau refleksi-kritis bersama akan berjalan efektif jika kemampuan berdialog masing-masing kurang-lebih sepadan. Artinya, kepedulian satu pihak terhadap peningkatan kemampuan dialog pihak-pihak lain akan sangat berguna untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran bersama di mana pihaknya dan pihak-pihak lain bersama-sama mendapatkan manfaatnya. Pengajar etika harus mengekspresikan sikap kepedulian dan mendorong setiap peserta didik untuk peduli dengan sesama peserta didik. Pengajar sebaiknya memberikan prioritas kesempatan pertama terlebih dahulu kepada peserta didik yang terindikasi kurang memiliki partisipasi dalam dialog kritis atau yang memiliki daya refleksi kritis yang masih lemah, kemudian mendorong peserta didik lain untuk memberikan pendapat yang bisa memacu motivasinya untuk meningkatkan kemampuan refleksi kritisnya. Kuantitas dan kualitas partisipasi peserta didik dalam meningkatkan kemampuan

refleksi kritis peserta didik lain menjadi bagian dari penilaian hasil pembelajaran peserta didik.

(6) Prinsip profesionalisme

Prinsip ini tidak hanya berkenaan dengan tugas dan peran pengajar etika, tetapi juga berkenaan dengan keharusan peserta didik untuk meningkatkan sikap profesional di kelas dan di dalam kehidupannya sebagai warga masyarakat majemuk. Interaksi di dalam kelas pembelajaran merupakan miniatur interaksi kehidupan masyarakat majemuk yang diwarnai perbedaan kepercayaan atau keyakinan dari masing-masingarganya. Perbedaan kepercayaan atau keyakinan itu tidak serta merta mengakibatkan tiadanya standar baik objektif yang bisa diacu oleh semua warga. Dialog kritis yang bertanggungjawab justru merupakan upaya untuk menemukan suatu standar baik objektif dan memakainya sebagai acuan justifikasi pilihan keputusan dan tindakan yang baik. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak perlu diperuncing hingga menimbulkan perpecahan, melainkan perlu didamaikan melalui kesepakatan tentatif berlandaskan standar baik objektif itu. Kesepakatan terwujud dalam bentuk peraturan, kebijakan, prosedur pelaksanaan, dan lain sebagainya. Ketaatan pada apapun yang sudah disepakati merupakan syarat terbentuknya masyarakat majemuk yang teratur (*well-ordered society*), sementara ketidak-taatan akan mencerai-beraikannya. Profesionalisme menuntut ketaatan pada apa yang sudah disepakati. Jadi, pengajar etika harus memiliki komitmen untuk mematuhi semua peraturan dan

kebijakan yang sudah disepakati. Di tingkat kelas pembelajaran, pengajar etika dan semua peserta didik harus konsisten dengan kontrak kelas pembelajaran yang dibuat bersama-sama. Di tingkat sekolah/universitas, pengajar etika harus maksimal mematuhi kurikulum dan mengupayakan dengan efektif dan efisien pencapaian tujuan pembelajaran etika. Di tingkat masyarakat/negara, pengajar etika harus berkomitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan moral. Tanpa prinsip profesionalisme, semua proses pengajaran etika dan pendidikan akhlak/moral tidak akan efektif.

6. PENUTUP

Jika peran agama dan kebudayaan lokal adalah membina dan mengembangkan kepercayaan peserta didik terhadap standar moral, memperkuat kemauannya untuk berbuat baik, maka etika melengkapi peran itu dengan pembinaan dan pengembangan kemampuan peserta didik untuk melakukan refleksi kritis guna mewujudkan kepercayaannya menjadi perbuatan yang sungguh-sungguh baik, terbaik, tepat sesuai dengan konteks yang dihadapinya. Efektivitas pendidikan akhlak/moral di masyarakat majemuk menuntut peran agama dan kebudayaan lokal dan peran etika saling melengkapi. Pengajaran etika sebaiknya tidak ditujukan untuk mengambil alih peran agama dan kebudayaan lokal, melainkan ditujukan untuk membina kemampuan peserta didik dalam melakukan refleksi kritis dan berdialog antar sesama. Untuk itu, pengajar etika perlu berpegang pada enam prinsip etika, yaitu otonomi, tanggung jawab, transparansi, keadilan, kepedulian, dan profesionalisme. ###

CATATAN AKHIR

¹ Istilah “hibriditas” seringkali dipakai pada fenomena ini. Bdk. Bauman (2013)

² Bdk. Muchtar (2005), Moosa (2004), Kelsay (1995).

³ Kata “khuluq” memiliki akar kata yang sama dengan khalqun (kejadian), khaliqun (Pencipta) dan makhlukun (yang diciptakan). Jadi kata akhlak pada awalnya mengacu pada konsep kejadian atau penciptaan manusia dan alam semesta. Lihat: Muchtar (2005).

⁴ Tahap penundaan ini merupakan awal kesadaran dan otonomi seorang manusia. Semakin intensif penyelidikan yang dilakukan akal, maka semakin tinggi tingkatan hasratnya, semakin otonom dia atau semakin tinggi tingkat kesadarannya dalam mengambil keputusan. Bdk. Frankfurt (1971).

⁵ Beberapa kepercayaan dianggap merupakan kepercayaan mutlak namun tidak menghalangi efektivitas kepercayaan lain yang tergeser menjadi kepercayaan subordinat. Kepercayaan mutlak seperti itu berlaku untuk semua konteks, seperti misalnya kepercayaan terhadap keberadaan Tuhan dan kepercayaannya sendiri sebagai manusia.

⁶ Bdk. Magnis-Suseno (1987), hal. 34.

⁷ Bdk. Spaemann (1989).

⁸ Bdk. Winch (1972). Argumentasi Peter Winch mau membuktikan bahwa jenis signifikansi moral yang melekat pada tindakan seseorang berbeda dengan jenis signifikansi moral orang lain yang melekat pada tindakannya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, tiap orang memiliki kepercayaan terhadap standar moral yang berbeda-beda. Sedikitnya, perbedaan itu terdapat pada struktur nilai yang selalu segera muncul menjadi rujukan awal tindakan ketika orang melakukan refleksi kritis.

⁹ Pertanyaan-pertanyaan di luar batas keyakinan disebut Toulmin (1970) sebagai “limiting questions”.

¹⁰ Proposisi (proposition) merupakan makna dari serangkaian kata dalam kalimat (statement), sedangkan pengertian (notion) adalah makna dari suatu kata (word).

¹¹ Makna kepercayaan (belief) dan makna keyakinan (faith) yang dirujuk dalam paper ini hampir sama. Keduanya berkaitan dengan sesuatu yang orang terima dengan sepenuh hati sebagai suatu kebenaran dan dipergunakan sebagai acuan untuk bertindak. Namun makna keyakinan terkesan lebih dalam. Keyakinan merupakan kepercayaan

GUNARDI ENDRO – ETIKA DALAM PENGAJARAN ETIKA
DI MASYARAKAT MAJEMUK

kuat yang tertanam sangat dalam di hati orang dan umumnya berkaitan dengan doktrin agama. Baik kepercayaan maupun keyakinan dituntut ekspresinya menjadi suatu tindakan (action) untuk membuktikan kesungguhannya, meskipun asal muasal tuntutan itu berbeda. Tuntutan pada kepercayaan berasal dari konteks, sedangkan tuntutan pada keyakinan berasal dari keyakinan itu sendiri.

¹² Bdk. Bakker (1984), hal. 25-32.

¹³ Karya John Rawls, *A Theory of Justice* (1971) memberikan inspirasi beberapa prinsip etika yang diajukan di sini.

¹⁴ Masyarakat majemuk yang teratur dengan warganya yang penuh tanggung jawab bisa disepadankan dengan “community of responsibility” sebagaimana diilustrasikan oleh Smilansky (2005).

¹⁵ Menurut Aristoteles, titik awal seperti ini diperoleh dari proses pengasuhan masa kanak-kanak melalui kebiasaan-kebiasaan baik. Lihat Aristotle (1915): Book I.4, Line 1095b.4-6.

¹⁶ Argumentasi tentang keniscayaan etis transparansi dalam proses komunikasi dapat diperiksa pada Endro (2015).

DAFTAR PUSTAKA

- Aristotle. (1915). “Ethica Nichomachea”, dalam *The Works of Aristotle: Volume IX*. Translated into English by W.D. Ross, ed. W.D. Ross. Rev. ed. London: Oxford University Press.
- Bakker, Anton (1984). *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bauman, Zygmunt. (2013). “Glocalization and Hybridity”. *Glocalism: Journal of Culture, Politics and Innovation*. (2003), 1, DOI: 10.12893 / gjcpi2013.1.9. Published online by Globus et Locus, www.glocalismjournal.net.
- Bertens, K. (2007). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Endro, Gunardi. (2015). “Keniscayaan Etis Transparansi dalam Komunikasi Politik”. *Jurnal Etika*. Volume 7 (November 2015): 12-33.
- Frankfurt, Harry G. (1971). “Freedom of the Will and the Concept of a Person.” *Journal of Philosophy* LXVIII:1 (1971): 5-28.

- Kelsay, John. (1995). "Ethics". Dalam J.L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Vol.1, 442-6. NY: Oxford University Press.
- Magnis-Suseno, Franz. (1987). *Etika Dasar*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moosa, Ebrahim. (2004). "Ethics and Social Issues". Dalam R.C. Martin (ed.), *Encyclopedia of Islam and the Muslim World*, Vol.1, 224-31. NY: Macmillan Reference USA.
- Muchtar, Affandi. (2005). "Akhlak". Dalam T. Abdullah et.al., *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam: Ajaran*, Vol.3, 325-37. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve.
- Rawls, John. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge-MA: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Robertson, Roland. (1995) "Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity". Dalam M. Featherstone, S. Lash and R. Robertson (eds.), *Global Modernities*, 25-44. London: SAGE Publ.
- Robertson, Roland. (1997). "Comments on the "Global Triad" and "Glocalization". Dalam Inoue Nobutaka (ed.), Conference on *Globalization and Indigenous Culture*. Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University. <http://www2.kokugakuin.ac.jp/ijcc/wp/global/>
- Smilansky, Saul. (2005). "Free Will and Respect for Persons". *Midwest Studies in Philosophy XXIX*: 248-61.
- Spaemann, Robert. (1989). "Moral Philosophy: are good and evil relative?" (Chapter 1), *Basic Moral Concepts*. 1-12, NY: Routledge.
- Toulmin, Stephen E. (1970). *An Examination of the Place of Reason in Ethics*. London: Cambridge University Press.
- Winch, Peter. (1972). *Ethics and Action*. London: Routledge & Kegan Paul.